



# RENSTRA 2021 - 2026



DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BERAU  
2021

**LEMBAR PENGESAHAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**TAHUN 2021-2026**

**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BERAU**

Tanjung Redeb, 6 September 2021  
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan  
Kabupaten Berau



**Drh. Mustakim Suharjana**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19670327 199403 1 005**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Rancangan akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 04 Januari 2020 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Pasal 15, Pasal 16 (2) dan Pasal 109 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan Penyusunan rancangan awal RPJMD. Dilanjutkan dengan Pasal 120-124 bahwa Rancangan Akhir RENSTRA disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi agar selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam berbagai bentuk, baik sumbang saran, kritik dan masukannya dalam Penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Tanjung Redeb, 6 September 2021  
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan  
Kabupaten Berau,



**Drh. Mustakim Suharjana**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670327 199403 1 005

**DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	4
C. Maksud dan Tujuan .....	7
D. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	10
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau .....	10
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	10
2. Struktur Organisasi .....	10
B. Sumber Daya Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau .....	13
1. Sumber Daya Manusia .....	13
2. Sarana dan Prasarana/Aset .....	19
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ke Depan .....	25
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	29

A.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau ...	29
B.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	32
C.	Telaahan Renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Provinsi .....	34
	1. Telaahan Renstra Kementererian/Lembaga .....	34
	2. Telaahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur .....	41
	3. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur .....	43
D.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .....	47
E.	Penentuan Isu Strategis .....	50
	<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>51</b>
A.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau .....	51
	<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>53</b>
A.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau .....	53
	<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>58</b>
A.	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pertanian dan Peternakan Kaupaten Berau .....	58
	<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>68</b>
A.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah .....	68
	<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

		Hal
1	Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Golongan/Ruang dan Status Kepegawaian	10
2	Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Tingkat Pendidikan	11
3	Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Jabatan Struktural	12
4	Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Latar Belakang Pendidikan Pejabat Struktural	13-15
5	Sumber Daya Manusia Fungsional (PPL) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Golongan/Ruang dan Status Kepegawaian	16
6	Sumber Daya Manusia Fungsional Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Tingkat Pendidikan	16
7	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau	18-19
8	Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Berau Periode 2016-2019	19
9	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Tahun 2016-2019	21
10	Capaian Pertumbuhan dan Perkembangan Populasi Ternak Ruminansia di Kabupaten Berau Kurun	22

## Waktu 2016-2019

11	Capaian Pertumbuhan dan Perkembangan Populasi Ternak Unggas Kabupaten Berau Kurun Waktu 2016-2019	23
12	Perkembangan Produksi Daging Ternak Ruminansia Periode Tahun 2016-2019	23
13	Data Produksi Daging Ayam Ras Pedaging periode tahun 2016-2019	24
14	Data Produksi Telur periode tahun 2016-2019	25
15	Data Konsumsi Daging dan Telur di Kabupaten Berau Tahun 2016-2019	25
16	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau	33-45
17	Rumusan Permasalahan	55-56
18	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2017-2021	76
19	Tujuan, Sasaran dan Kebijakan	79-86
20	Program, Kegiatan (Sub Kegiatan) Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau Tahun 2021	89-95
21	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2017-2021	96-107
22	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2021	108-111
23	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau yang Mengacu pada	113

## Tujuan dan Sasaran RPJMD

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan

Dokumen Rencana Strategik (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang pertanian. Renstra ini juga berfungsi sebagai arah dan tolok ukur capaian kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun yang pada pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

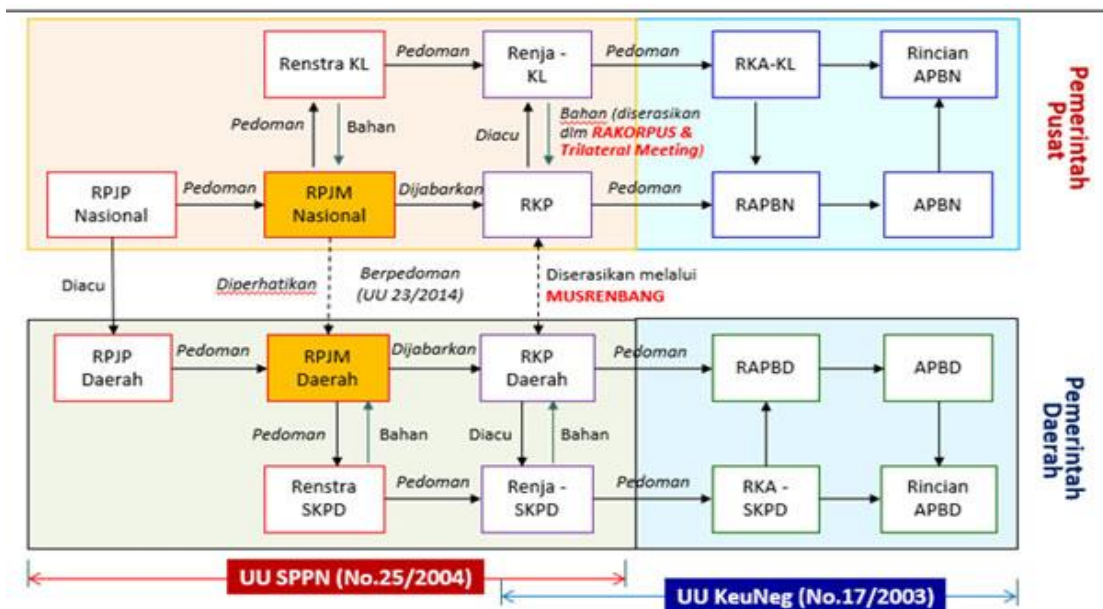
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politik berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang

dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;

5. RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Hubungan dari berbagai dokumen perencanaan tersebut, digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. 1. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Berau dan Dokumen Lainnya.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;

3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;
21. Peraturan Bupati Berau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau;

22. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau.

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **I. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 adalah:

- Sebagai Pedoman bagi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
- Menjadi pedoman dalam penetapan program dan kegiatan tahunan maupun penyusunan Rencana Kerja (Renja) agar berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.
- Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau.

#### **2. Tujuan**

- 1) Mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih;
- 2) Sebagai acuan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD);

### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya , Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis (RENSTRA) K/L dan Rencana Strategis (RENSTRA), Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah, dan Penentuan isu-isu strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang akan di capai dari perangkat daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencaai target tujuan dan sasaran yang ada.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang ditetapkan disertai dengan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan terhadap isi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 serta catatan dan harapan Kepala SKPD.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### A. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

##### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau bahwa Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau mempunyai tugas pokok, yaitu :

**“ Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah di Bidang Pertanian pada Sektor Pertanian dan Peternakan “**

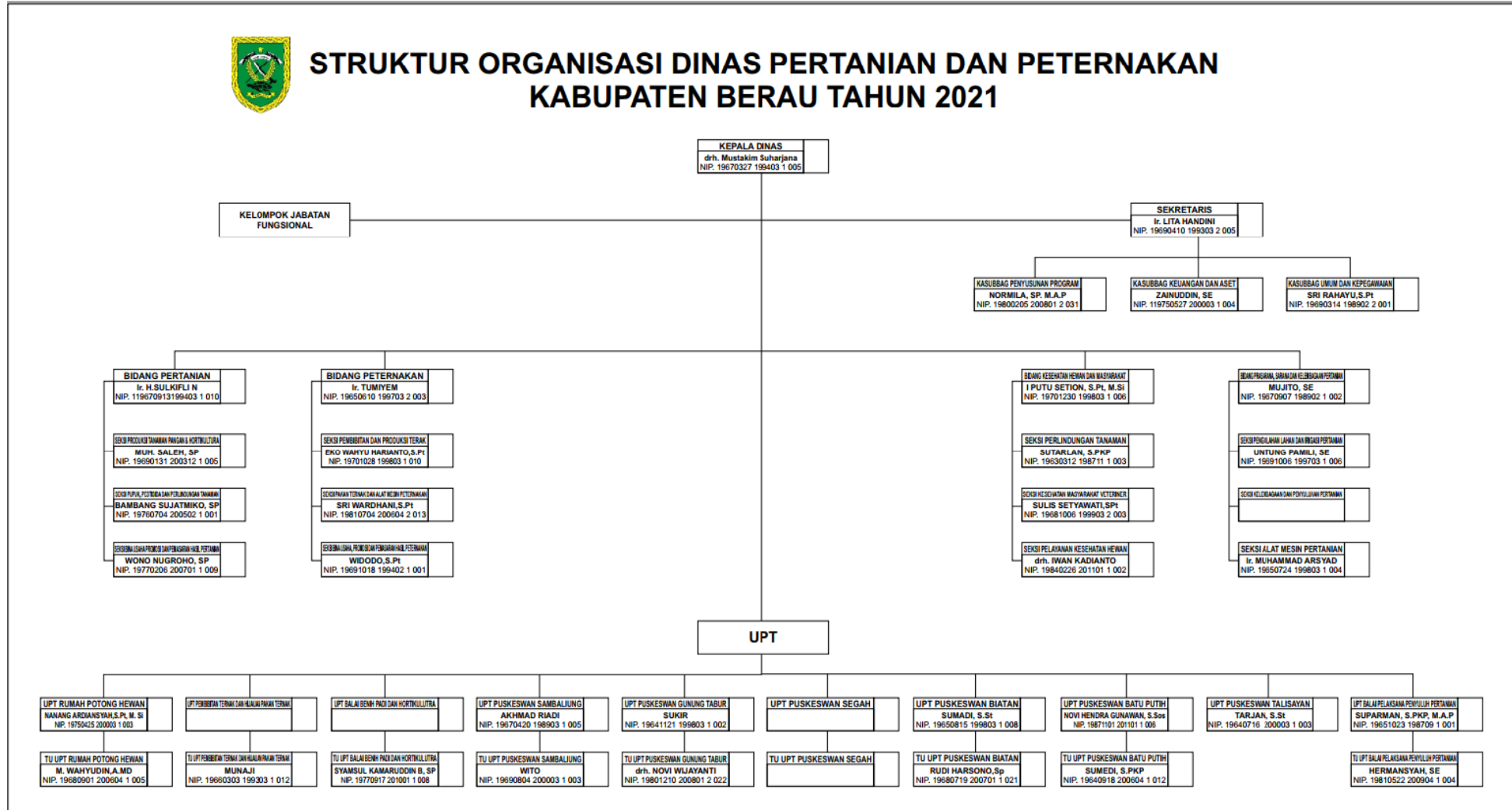
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

1. Perumuskan Kebijakan di bidang pertanian pada sektor Pertanian dan Peternakan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang pertanian pada sektor Pertanian dan Peternakan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas di bidang pertanian pada sektor Pertanian dan Peternakan;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup Tugasnya; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

##### 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah , dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau, dan ditambahkan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. Sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai komposisi struktur sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau



Penjabaran struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan berdasarkan Perbup Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat;** terdiri dari 3 ( tiga ) Sub Bagian, antara lain:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. **Bidang Pertanian;** terdiri dari 3 ( tiga ) Seksi, antara lain:
  - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Perlindungan Tanaman
  - c. Seksi Bina Usaha, Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian
4. **Bidang Peternakan;** terdiri dari 3 (tiga) Seksi, antara lain:
  - a. Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak
  - b. Seksi Pakan Ternak dan Alat Mesin Peternakan
  - c. Seksi Bina Usaha, Promosi dan Pemasaran Hasil Peternakan
5. **Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;** terdiri dari 3 (tiga) Seksi, antara lain:
  - a. Seksi Perlindungan Hewan
  - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan
6. **Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Pertanian;** terdiri dari 3 (tiga) Seksi, antara lain:
  - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian
  - b. Seksi Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian
  - c. Seksi Alat Mesin Pertanian
7. **Unit Pelaksana Teknis (UPT);**
  - a. Balai Benih Padi dan Hortikultura
    - a.a. TU UPT Balai Benih Padi dan Hortikultura
  - b. Rumah Potong Hewan
    - b.b. TU UPT Rumah Potong Hewan

- c. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
  - c.c. TU UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- d. Puskesmas Sambaliung
  - d.d. TU UPT Puskesmas Sambaliung
- e. Puskesmas Gunung Tabur
  - e.e. TU UPT Puskesmas Gunung Tabur
- f. Puskesmas Segah
  - f.f. TU UPT Puskesmas Segah
- g. Puskesmas Biatan
  - g.g. TU UPT Puskesmas Biatan
- h. Puskesmas Batu Putih
  - h.h. TU UPT Puskesmas Batu Putih
- i. Puskesmas Talisayan
- j. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian
  - j.j. TU UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional

## B. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

### 1. Sumber Daya Manusia

(Per Maret 2021)

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur yang dirinci berdasarkan tingkat golongan ruang yang dimiliki sebagai berikut:

**Tabel I**

**Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Golongan/Ruang dan Status Kepegawaian**

No.	Golongan	Ruang				Status Kepegawaian		Jumlah
		a	b	c	d	CPNS	PNS	
1	Golongan I	-	1	1	2	-	4	4
2	Golongan II	8	2	7	15	-	32	32
3	Golongan III	15	8	12	27	2	60	62
4	Golongan IV	8	1	1	-	-	10	10
5	Non PNS	-	-	-	-	-	-	30
Total						2	106	138

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 138 orang SDM yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang aparatur golongan IV, 62 (enam puluh dua) orang aparatur golongan III, 32 (tiga puluh dua) orang aparatur golongan II dan 4 (empat) orang aparatur golongan I, serta non PNS sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS	T o t a l
		Laki-Laki	Perempuan		
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	2	-	2	4
3	SLTA	27	9	14	50
4	Diploma	6	2	1	9
5	SI	33	20	12	65
6	S2	6	3	1	10
Jumlah		74	34	30	138

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sumber daya aparatur yang berstatus PNS dan Non PNS pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan bahwa didominasi oleh tingkat pendidikan SI/D.IV dengan jumlah 65 (enam puluh lima) orang atau 47,10%, selanjutnya SLTA jumlah 50 (lima puluh) orang atau 36,23%, S2/Profesi 10 (sepuluh) orang masing-masing untuk S2 5 (lima) orang dan Profesi (dokter hewan) 5 (lima) orang, diploma 9 (Sembilan) orang, dan terakhir SLTP 4 (empat) orang atau hanya 2,90%.

Sedangkan sumber daya aparatur pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau berdasarkan tingkat eselon (jabatan struktural) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Jabatan Struktural**

No.	Jabatan	Jumlah Eselon			Keterangan
		Tersedia	Terisi	Lowong	
1	Eselon II.B	1	1	-	
2	Eselon III.A	1	1	-	
3	Eselon III.B	4	4	-	
4	Eselon IV.A	24	20	4	4 kosong
5	Eselon IV.B	10	9	1	1 kosong
Jumlah		40	40	35	5

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal terkait dengan jumlah jabatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau sebagai berikut:

- I. Eselon II.B adalah eselon untuk jabatan Kepala Dinas, jabatan tersebut telah terisi definitif.

2. Eselon III.A adalah eselon untuk jabatan Sekretaris Dinas, dan jabatan tersebut telah terisi definitif.
3. Eselon III.B adalah eselon untuk jabatan Kepala Bidang pada Dinas, sebanyak 4 (empat) dan telah terisi definitif.
4. Eselon IV.A adalah eselon untuk jabatan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT dan 4 (empat) kosong yaitu Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian, Kepala UPT. Puskeswan Segah, Kepala UPT. Balai Benih Padi dan Hortikultura, dan Kepala UPT. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
5. Eselon IV.B adalah eselon untuk jabatan Kepala UPT (tipe B) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT dan 1 (satu) kosong yaitu Kepala TU pada UPT. Puskeswan Segah.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsi teknis dilapangan yang terdiri dari pelayanan, pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau membutuhkan sumber daya manusia teknis/fungsional untuk kegiatan Pertanian yaitu PPL (Petugas Penyuluh Lapangan). Rincian tenaga PPL (PNS dan THL) yang tersedia saat ini sebagai berikut :

Tabel 4

**Sumber Daya Manusia Fungsional (PPL) Dinas Pertanian dan  
Peternakan Kabupaten Berau Menurut Golongan/Ruang dan Status  
Kepegawaian**

No.	Golongan	Ruang				Status Kepegawaian		Jumlah
		a	b	c	d	CPNS	PNS	
1	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
2	Golongan II	8	1	5	1	-	15	15
3	Golongan III	9	4	3	3	-	19	19
4	Golongan IV	4	-	-	-	-	4	4
5	Non PNS	-	-	-	-	-	-	16
Total						-	38	54

Tabel 5

**Sumber Daya Manusia Fungsional Dinas Pertanian dan Peternakan  
Kabupaten Berau Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	CPNS dan PNS		THL	Total
		Laki-Laki	Perempuan		
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-
3	SLTA	6	5	4	15
4	Diploma	3	2	1	6
5	SI	13	9	11	33
6	S2	-	-	-	-
Jumlah		22	16	16	54

Untuk sumber daya manusia teknis/fungsional Peternakan diantaranya adalah tenaga medik dan paramedik, dengan rincian yang tersedia saat ini sebagai berikut:

1. Medik Veteriner

- UPT. Puskesmas Talisayan : drh. Ahmad Najib MR
- UPT. Puskesmas Gunung Tabur : drh. Novi Wijayanti, drh. M. Rofi' Prasetya, M.Si

2. Paramedik Veteriner

- UPT. Puskesmas Batu Putih : Sumedi, S.PKP dan Melly Meriem
- UPT. Puskesmas Talisayan : Nopan Basri, A.Md
- UPT. Puskesmas Biatan : Mujtahid dan M. Said
- UPT. Puskesmas Sambaliung : Kiswoyo, A.Md
- UPT. Puskesmas Gunung Tabur : L.M. Abdul Azis A, A.Md
- UPT. Puskesmas Segah : Maskur, Purwanto

3. Kantor Dinas

- Medik Veteriner : drh. Iwan Kadianto

- Paramedik Veteriner : Massiri Ampulembang, Sarmun

Tenaga paramedik ini dibayarkan melalui honorarium kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan yang terdapat di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet. Berdasarkan jumlah ketersediaan tenaga tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia masih kurang, minimal setiap Puskesmas terdapat 1 Medik dan 2 Paramedik Veteriner agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

## 2. Sarana dan Prasarana/Aset

Ketersediaan sarana dan prasarana adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 6**  
**REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA**  
**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU**

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi Tahun 2019			Keterangan Kondisi Tahun 2020			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Keterse-diaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Tanah	m <sup>2</sup>	93.192	-	-	-	-	-	93.192	93.192	100%
2.	Gedung	Unit	13	-	-	-	-	-	13	13	100%
3.	Listrik	Unit	7	-	-	-	-	-	7	7	100%
4.	Air	Unit	2	-	-	-	-	-	2	2	100%
5.	Telepon	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	0%
6.	Area Parkir	Buah	3	-	-	-	-	-	3	3	50%
7.	Ruang Rapat	Ruangan	1	-	-	-	-	-	1	1	100%
8.	Ruang Arsip	Buah	-	-	-	-	-	-	-	1	0%
9.	Koperasi	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100%
10.	Taman Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
11.	Kantin	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100%
12.	Musholla	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100%
13.	Kendaraan Roda 4	Unit	9	-	-	-	-	-	9	10	90%
14.	Kendaraan Roda 2	Unit	85	-	-	1	-	-	86	86	100%
15.	Meja Kursi Rapat	Unit	3	-	-	60	-	-	63	63	100%
16.	AC	Unit	25	-	-	-	-	-	25	25	100%
17.	Komputer PC	Unit	47	-	-	9	-	-	56	56	100%
18.	Komputer Notebook/Laptop	Unit	16	-	-	3	-	-	19	19	100%
19.	Meja Kerja	Unit	55	-	-	12	-	-	67	67	100%
20.	Kursi Kerja	Unit	40	-	-	10	-	-	50	50	100%
21.	Filing Kabinet	Unit	11	-	-	-	-	-	11	11	100%
22.	Rak Arsip	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100%
23.	Infokus	Unit	4	-	-	-	-	-	4	4	100%

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi Tahun 2019			Keterangan Kondisi Tahun 2020			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Keterseediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24.	Jaringan Internet	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100%
25.	Area Taman Luar	-	1	-	-	-	-	-	1	1	100%
26.	Lemari Arsip	Unit	19	-	-	-	-	-	19	19	100%
27.	Genset	Unit	2	-	-	-	-	-	2	2	100%
28.	Mesin Sedot Air	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100%
29.	Global Positioning System	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100%
30.	Meja Makan	Unit	20	-	-	-	-	-	20	20	100%
31.	Televisi	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100%
32.	Wireless	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100%
33.	Megaphone	Unit	5	-	-	-	-	-	5	5	100%
34.	Handy Talky	Unit	10	-	-	-	-	-	10	10	100%
35.	Wireless Amplifier	Unit	3	-	-	-	-	-	3	3	100%
36.	Printer	Unit	3	-	-	12	-	-	15	15	100%
37.	Jalan	Paket	1	-	-	1	-	-	2	2	100%
38.	Jalan Lingkungan/ Halaman	Paket	-	-	-	1	-	-	1	1	100%
39.	Hardisk External	Unit	-	-	-	5	-	-	5	5	100%
40.	Sumur Bor (beserta pompa)	Unit	-	-	-	1	-	-	1	1	100%
41.	Jaringan Pembawa Irigasi	Paket	-	-	-	1	-	-	1	1	100%
42.	Mesin Jahit Karung	Unit	-	-	-	3	-	-	3	3	100%
43.	Meja Kursi Tamu	Set	-	-	-	1	-	-	1	1	100%
44.	Kulkas	Unit	-	-	-	2	-	-	2	2	100%
45.	Kamera	Unit	-	-	-	3	-	-	3	3	100%
46.	Green House	Unit	-	-	-	1	-	-	1	1	100%
47.	Speaker	Unit	-	-	-	1	-	-	1	1	100%
48.	Papan Nama Instansi	Unit	-	-	-	1	-	-	1	1	100%
49.	Pagar UPT	Paket	-	-	-	1	-	-	1	1	100%
50.	Tandon Air	Unit	-	-	-	6	-	-	6	6	100%
51.	Bangunan dan Drainase UPT	Paket	-	-	-	1	-	-	1	1	100%
52.	Mesin Press Plastik	Unit	-	-	-	2	-	-	2	2	100%
53.	Container 50 liter	Unit	-	-	-	4	-	-	4	4	100%

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi Tahun 2019			Keterangan Kondisi Tahun 2020			Jumlah	Jumlah Ideal	Persenta se Keterse diaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	10 liter					3			3	3	

### C. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, dimana didalamnya termuat beberapa target indikator yang harus dicapai oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau terbuat dalam tabel 7 berikut.

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Sektor Pertanian (persen)	5,74	6,04	6,34	6,49	6,49	5,74	6,04	6,34	5,16	5,91	100,00	100,00	100,00	79,51	91,06
2	Produksi Padi (ton)	32.436	32.100	35.398	38.938	36.000	32.436	32.180	28.873	37.753	29.204	100,00	100,25	81,57	96,96	81,12
3	Produksi Jagung (ton)	15.460	36.380	57.300	78.300	85.000	15.460	36.481	66.081	75.489	74.673	100,00	100,28	115,32	96,41	87,85
4	Produksi Daging (ton)	2.611	2.700	2.750	2.800	3.000	2.611,012	2.836,344	2.820,575	4.011,958	3.167,749	100,00	105,05	102,57	143,28	105,59
5	Kelompok Tani yang Naik Kelas (kelompok)	0	0	22	25	25	0	0	22	25	28	0,00	0,00	100,00	100,00	112,00

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat di temukan beberapa kesenjangan/hal-hal yang belum tercapai antara lain:

1. PDRB sektor pertanian
2. Produksi Padi
3. Produksi Jagung

Sementara itu untuk realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PENDAPATAN</b>																	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>																	
Pendapatan Retribusi Daerah	183.000.000	205.000.000	233.000.000	264.000.000	247.500.000	193.168.800	230.342.500	256.644.500	244.374.500	236.044.300	105,56	112,36	110,15	92,57	95,37	0,06	0,04
<b>BELANJA</b>																	
<b>BELANJA OPERASI</b>																	
Belanja Pegawai	14.247.690.000	8.741.400.000	13.121.478.374	14.607.314.500	13.079.650.000	10.971.816.413	8.592.072.097	12.084.596.772	13.622.551.254	12.280.553.653	77,01	98,29	92,10	93,26	93,89	-0,02	0,02
Belanja Barang	30.133.535.520	7.224.869.850	7.091.605.000	16.117.118.400	6.735.398.520	14.451.136.944	6.321.467.827	6.204.445.875	14.536.791.349	6.070.779.203	47,96	87,50	87,49	90,19	90,13	-0,26	-0,16
Belanja Hibah		1.980.443.150	329.750.000		4.410.184.000	13.712.991.879	1.079.276.250	329.325.000		4.175.370.500							
<b>BELANJA MODAL</b>																	
Belanja Peralatan dan Mesin	726.339.125	232.500.000	381.080.000	412.600.000	657.400.000	663.459.875	221.835.000	337.697.000	364.030.000	627.286.400	91,34	95,41	88,62	88,23	95,42	-0,02	-0,01
Belanja Bangunan dan Gedung	1.064.495.000	172.210.000	579.000.000	1.274.490.600	309.180.000	1.043.023.000	134.086.000	557.630.000	641.213.000	307.450.000	97,98	77,86	96,31	50,31	99,44	-0,22	-0,22
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	358.160.000	92.401.000	279.571.000	172.800.000	358.750.000	354.997.500	87.087.000	249.397.000	171.252.000	355.437.000	99,12	94,25	89,21	99,10	99,08	0,00	0,00
Belanja Tanah			310.000.000					308.574.000									

## **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau**

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja diatas, dapat ditemukan beberapa tantangan dan peluang bagi Dinas Pertanian dan Peternakan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Tantangan yang ada antara lain:

### ***1. Persentase Tenaga Kerja Pertanian yang Menurun***

Sebagai bagian dari negara agraris, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Berau. Walaupun masih besar, namun, persentase jumlah tenaga kerja yang ada di sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penyebab utama merosotnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian adalah terlalu kecilnya pendapatan dari pekerjaan sebagai petani. Rendahnya pendapatan petani juga terkait erat dengan kepemilikan lahan petani.

Dengan rendahnya pendapatan di sektor pertanian, perpindahan profesi dari sektor pertanian ke sektor lainnya, terutama ke sektor industri tidak bisa terhindarkan lagi. Masyarakat memilih bekerja di sektor yang memberikan penghasilan besar.

Merosotnya persentase tenaga kerja di sektor pertanian harus segera ditanggapi serius oleh pemerintah daerah dengan kebijakan yang bisa mendorong peningkatan pendapatan petani seperti mengembangkan bantuan permodalan dan penerapan manajemen teknologi pertanian. Upaya tersebut harus diikuti dengan upaya perbaikan di sektor pasca panen. Petani sering kali tidak mendapatkan harga jual yang baik di saat panen tiba. Karena itu, pemerintah akan menjamin hasil panen bisa terserap dengan baik dan dengan harga yang menguntungkan. Peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk terjun ke sektor itu.

## 2. ***Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global***

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi subsektor pertanian tanaman pangan dampak lanjutannya adalah bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosif hama dan penyakit tanaman serta pada akhirnya penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi hal ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapang dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi yang diperlukan.

## 3. ***Ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, lahan dan air masih terbatas***

Prasarana pertanian yang saat ini memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru dan rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian menurun. Tantangan yang dihadapi bagaimana meningkatkan partisipasi petani dalam perlindungan DAS, Pemeliharaan jaringan irigasi desa, pengembangan sumber-sumber air alternative serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan hujan.

Prasarana lain yang dibutuhkan namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan Usahatani dan jalan produksi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan prasarana yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup.

Disisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi belum tersedianya benih/bibit unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian hingga ketingkat usahatani serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Tantangan kedepan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat mesin pertanian, mendorong petani

memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik serta mendorong petani menggunakan pestisida yang ramah lingkungan.

**4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani**

Petani belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Tantangan kedepan adalah bagaimana pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan.

**5. Terjadinya alih fungsi lahan dari sub sektor tanaman pangan ke sub sektor non pertanian lainnya**

Meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan diluar sub sektor pertanian tanaman pangan dan Peternakan seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, pemukiman dan fasilitas umum lainnya. Hal ini tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan menurun tapi juga semakin sempitnya luas garapan usahatani, degradasi tradisi dan budaya pertanian serta turunnya kesejahteraan petani. Tantangan untuk menghadapi ini bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian yang ada, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan.

**6. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)**

Umumnya petani tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil dan subsistem, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Selain itu petani belum memiliki fasilitas penyimpanan hasil pascapanen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Ini berakibat banyak petani yang terlibat ke dalam system ijon dan/atau tengkulak. NTP sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani kondisinya di Kabupaten Berau selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir bergerak fluktuatif.

### **7. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani**

Kondisi organisasi petani lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar bagi pengembangan usahatani usaha pertanian. Tantangan kedepan bagaimana kelembagaan petani ini merevitalisasi diri dari kelembagaan pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum dan berintegrasi dalam koperasi yang ada dipedesaan.

### **8. Belum padunya antar sektor penunjang pembangunan pertanian**

Pembangunan pertanian tidak bisa berdiri sendiri melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Koordinasi antar sektor sudah sering dilakukan, hanya saja mengintegrasikan secara fisik kegiatan antar sektor masih sulit dilaksanakan.

Sementara itu, peluangnya antara lain:

- 1. Dukungan potensi Sumber Daya Alam dan Agroklimat yang sesuai**
- 2. Terbentuknya kelembagaan/organisasi pendukung dan pelaksana kegiatan pertanian**
- 3. Tersedianya IPTEK pertanian dan peternakan tepat guna**
- 4. Peluang pasar komoditi pertanian dan peternakan**
- 5. Partisipasi aktif stakeholder**
- 6. Dukungan program Bupati Berau berupa Pemberian Bantuan Stimultan (Sapronak, Saprodi, Alsintan) dalam mewujudkan Sektor Pertanian dan Peternakan yang maju berbasis teknologi.**

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

Berdasarkan analisis terhadap capaian pelayanan perangkat daerah pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan tersebut dikelompokkan kedalam 3 kelompok. Hal ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya. Identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut terdapat dalam tabel 3.1.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
I	Produksi Pertanian Belum Optimal	Belum optimalnya penerapan teknologi intensifikasi pertanian	Belum maksimalnya pemakaian bibit unggul dan pemupukan
			Belum Optimalnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
			Terbatasnya jumlah petugas POPT
		Rendahnya pemakaian bio pestisida dan pupuk organik	
		Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian	Belum terbitnya Perda Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
		Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian	Belum terpenuhinya penyediaan dan pemanfaatan Alat Mesin Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Belum maksimalnya Pembinaan ke Pelaku usaha utama pertanian	Belum optimalnya Jaringan irigasi, Pintu Air, Jalan Usahatani, DAM parit, dan embung
			Belum optimalnya Kapasitas Penyuluhan Pertanian
			Belum optimalnya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani
			Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
			Kurangnya jumlah penyuluh
		Kurangnya permodalan bagi pelaku usaha pertanian	Fasilitas yang disediakan perbankan belum dapat dimanfaatkan secara optimal
2	Rendahnya Harga jual produk pertanian	Kualitas hasil produk pertanian yang belum memenuhi standar mutu permintaan pasar	Pembinaan Petani serta Pelaku Usaha Pertanian belum optimal
			Terbatasnya Alat pasca panen yang menunjang
			Belum optimalnya Penanganan pasca panen
			Belum optimalnya kerjasama pemasaran dengan pihak swasta
3	Peningkatan populasi ternak besar belum optimal	Sistem Pemeliharaan ternak belum optimal	Pemeliharaan ternak masih banyak menggunakan sistem semi intensif bahkan masih ada yang menggunakan sistem ekstensif
			Pelayanan IB yang belum optimal
		Minat masyarakat terhadap IB masih kurang	
		Pelaporan dan pengetahuan peternak akan kondisi ternak masih kurang (Deseksi lokasi peternak masih belum tepat)	
		Kurangnya sarana prasarana pelayanan IB	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Masih kurangnya penyediaan Pakan Ternak	Banyak peternak yang menganggap rumput alam masih cukup untuk penyediaan nutrisi ternak tanpa menyediakan pakan lainnya Kurangnya minat peternak akan teknologi pengolahan pakan ternak
		Kurangnya pengetahuan bagi pelaku usaha peternakan	Sosialisasi dan pembinaan belum maksimal
		Kurangnya permodalan bagi pelaku usaha peternakan	Fasilitas yang disediakan perbankan belum dapat dimanfaatkan secara optimal
		Pemotongan Sapi Betina (Produktif) di UPT RPH	Pemahaman Pelaku usaha Peternakan (Peternak, Belantik dan jagal) mengenai penyelamatan betina produktif masih kurang Kebutuhan konsumsi daging tidak dapat dipenuhi dari persediaan sapi jantan
		Penyakit hewan menular strategis masih terjadi dan perlu dikendalikan	Pelaksanaan vaksinasi belum maksimal
			Masih kurangnya petugas medik dan paramedik veteriner
			Belum optimalnya Surveilans penyakit hewan menular strategis Masih kurangnya sarana prasarana penanggulangan penyakit hewan menular strategis
4	Kualitas bahan pangan asal hewan masih rendah	Belum optimalnya pengawasan peredaran bahan pangan asal hewan	Belum adanya petugas pengawas mutu bahan pangan asal hewan

## B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Berau Tahun 2020 lalu.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Berau sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor I Tahun 2021 adalah:

***“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”***

Dalam mewujudkan visi diatas, terdapat 4 (Empat) misi, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

Berdasarkan misi diatas, Dinas Pertanian dan Peternakan memiliki fokus pencapaian pada ***misi kedua***. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Terpilih bagi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau disajikan dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>Misi 2:</b> Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan local</p> <p><b>Program I4</b> Pemberian Bantuan Stimulan (Sapronak, Saprodi, Alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi</p>	<p>I. Tingginya harga Sapronak, Saprodi, Alsintan</p>	<p>1. Keterbatasan anggaran pembiayaan APBD II</p> <p>2. Masih rendahnya peran sektor swasta</p> <p>3. Kurang tersedianya Sapronak, Saprodi, Alsintan di dalam daerah</p>	<p>1. Adanya dukungan pembiayaan APBD I dan APBN</p> <p>2. Tersedianya permodalan dari perbankan dengan bunga rendah</p> <p>3. Adanya kemitraan usaha antara petani /peternak dengan pihak swasta</p>

## C. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

### I. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung dibawah Kementrian Pertanian. maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

**Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis Kawasan pertanian.

Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian.

Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

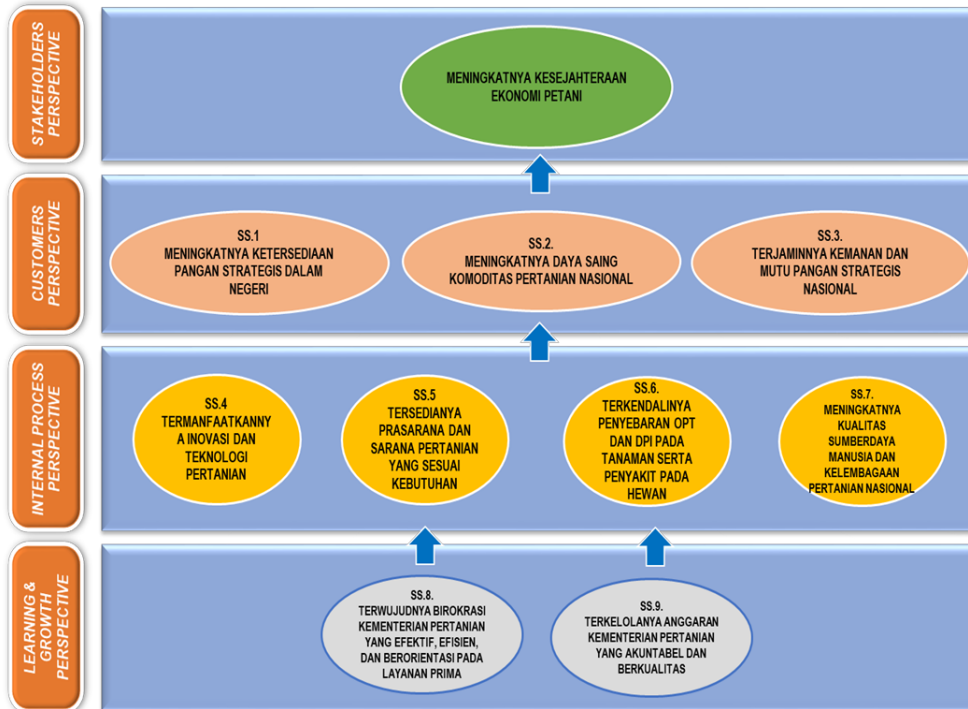
Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator:
  - Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 62,6 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024),
  - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024),
  - Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/hari hingga tahun 2024,
  - Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kapita/hari hingga tahun 2024,
  - Prevalence of Under-nourishment /PoU (Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2% (Th. 2020) dan 5,0 % (Th. 2024),
  - Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th. 2020) dan nilai 4,0 (Th. 2024),

- Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020 dan 46,8 juta ton (th. 2024),
  - Ketersediaan protein hewani dengan target 2,50 juta ton (Th. 2020) dan 2,90 juta ton (Th. 2024),
  - Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th. 2020) dan 100% (Th. 2024),
  - Persentase pangan organik dengan target 5% (Th. 2020) dan 20% (Th. 2024).
- Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator:
    - Nilai tambah per tenaga kerja dengan target Rp. 49,3 juta/tenaga kerja (Th. 2020) dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja (Th. 2024),
    - Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th. 2024),
    - Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th. 2020) dan 5,0% (Th. 2024),
    - Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8% (Th. 2020) dan 5,9% (Th. 2024),
    - NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024).

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective*.



Gambar 1. Peta Strategi Kementerian Pertanian 2020-2024

Indikator kinerja tersebut kemudian di turunkan (cascading) ke dalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian outcome yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya.

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2	Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	1,30	1,35	1,40	1,45	2,00
		3	Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian	%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	4	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	%	80,00	83,50	87,00	90,00	93,00
		5	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	%	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	6	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	%	65,00	70,00	70,00	75,00	75,00
		7	Teknologi yang diterapkan oleh petani	%	70,00	74,00	78,00	82,00	85,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						
			2020	2021	2022	2023	2024		
5	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	8	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	Indeks	62,55	63,10	63,56	64,05	64,55
		9	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	Indeks	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92
6	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	10	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	58,45	58,71	59,34	60,53	62,56
		11	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	78,90	79,50	80,10	80,80	81,60
		12	Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
7	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	13	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		14	Persentase Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
8	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	15	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	79,96	80,71	81,46	82,21	82,96
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	16	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,23	91,61	91,98	92,36	92,73

## 2. Telaahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2018 -2023 yaitu pada misi 2 (dua) "Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan" adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang hendak dicapai dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>VISI</b>	Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat		
<b>MISI</b>	Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Mewujudkan Peningkatan Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	1. Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB	1. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1. Pengembangan Kawasan Hortikultura Pola Pekarangan (Pisang, Durian/Lai, Pepaya, Jeruk, Manggis, Kelengkeng, Alpukat, Jambu Kristal, Sukun, dan Buah Lokal Lainnya)  2. Perbaikan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil  3. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Produksi Hortikultura (Alat dan Mesin Pertanian Hortikultura)

<p>2. Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan</p>	<p>1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Komoditas Padi</p>	<p>1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan</p> <p>2. Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>3. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>4. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>5. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian</p> <p>6. Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <p>7. Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan</p>	<p>1. Pengembangan Padi Lahan Kering/Padi Ladang dan Padi Sawah</p> <p>2. Alat dan Mesin Pertanian untuk Padi Lahan Kering</p> <p>3. Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)</p> <p>4. Perbaikan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan</p> <p>1. Pemurnian dan Pemendekan Umur Panen Padi Varietas Lokal</p> <p>2. Perbanyak Benih Padi Pola Kemitraan</p> <p>3. Perbanyak Benih Hortikultura</p> <p>1. Pelabelan Benih TPH</p> <p>2. Pengawasan Peredaran Benih TPH</p> <p>1. Gerakan Pengendalian OPT TPH</p> <p>2. Perbanyak Agens Hayati/Pestisida Ramah Lingkungan</p> <p>1. Optimalisasi Pemanfaatan BPP di Kabupaten/Kota se Kaltim</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Penyuluhan</p> <p>3. Pelatihan dan Pendampingan Petani/Pelaku Agribisnis Pelaksanaan PEDDA dan PENAS</p> <p>1. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)</p> <p>2. Peta PSVA, SKPG</p> <p>3. Informasi Harga Pangan Strategis</p> <p>1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan B2SA</p> <p>2. Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)</p> <p>3. Pengembangan Produk Pangan Lokal, Lomba Cipta Menu dan Hari Pangan Sedunia</p> <p>4. Pengawasan dan Sertifikasi Komoditi Pangan Segar</p>
--	---	---	---

Disamping itu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 – 2023 yaitu penyediaan lahan pertanian 1 ( satu ) juta ha (pertanian dalam arti luas ). Dan untuk pengembangan tanaman hortikultura salah satunya di fokuskan untuk pengembangan tanaman sukun. Program unggulan diatas sangat penting dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di kawasan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.

### 3. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023, maka Motto Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

**“Mini Ranch Sapi Potong untuk kesejahteraan peternak yang berdaulat”**

Motto tersebut mengandung 2 (dua) kata kunci yang merupakan pernyataan keinginan yang mencerminkan mimpi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yakni: 1) pengembangan *mini ranch*; dan 2) kesejahteraan peternak. Sebagaimana untuk mewujudkan Motto tersebut dan sejalan dengan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 terkait dengan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah : Misi kedua, yaitu **“Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan”**

Misi kedua Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan pengembangan peternakan sapi potong di lahan eks tambang dan integrasi dengan tanaman merupakan upaya dalam meningkatkan populasi sapi potong di Kalimantan Timur melalui pengembangan *mini ranch* untuk penyediaan daging yang berdaulat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan misi. Dalam periode 2019 – 2023 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu “Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah”. Adapun target PDRB subsektor peternakan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
	Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke				
				1	2	3	4	5
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah		Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37
		1. Meningkatnya kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	104	104,5	102	102	102
		2. Meningkatnya produksi pangan asal ternak	1. Produksi daging (ton)	82.811,60	85.479,70	86.334,50	87.197,84	88.069,82
			2. Produksi telur (ton)	11.786,10	12.058,60	12.179,19	12.300,98	12.423,99

Keterkaitan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatkan kontribusi sektor Peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi Lapangan Usaha Subsektor Peternakan terhadap Ekonomi Daerah terhadap PDRB (%)	1. Meningkatnya kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	1. Pengembangan Kawasan Peternakan sapi potong (mini ranch)	1 Pengembangan Kawasan peternakan	
			2. Meningkatnya produksi pangan asal ternak			1. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak	1 Pengembangan Sumber Daya Genetik Hayati (SDGH) 2 Penerapan teknologi peternakan 3 Peningkatan Pelayanan Inseminasi buatan 4 Peningkatan kapasitas petugas perbibitan/wasbitnak 5 Peningkatan kualitas dan kuantitas benih /bibit sesuai dengan standar 6 Penyebaran ternak indukan/ bibit
						2. Peningkatan produksi dan produktivitas pakan ternak	7 Peningkatan ketersediaan HPT, Bahan Pakan, Pakan 8 Peningkatan mutu dan kualitas HPT, Bahan Pakan, Pakan
				3. Peningkatan daya saing produk peternakan	9 Pengembangan usaha olahan produk peternakan 10 Peningkatan Promosi dan pemasaran hasil peternakan		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					4. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak	11 Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Pembebasan Penyakit Jembrana berdasarkan kompartemen 12 Peningkatan pengawasan lalu lintas hewan melalui penguatan dan pemberdayaan Check Point
					6. Penguatan pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet	13 Peningkatan surveilans dan pengujian penyakit hewan 14 Peningkatan surveilans dan pengujian produk asal hewan
					7. Peningkatan Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan	15 Peningkatan keamanan produk hewan 16 Peningkatan kapasitas petugas/auditor 17 Peningkatan unit usaha yang menerapkan kesrawan
					8. Peningkatan Peran swasta dan usaha peternakan rakyat	18 Peningkatan akses pembiayaan usaha peternakan 19 Peningkatan regulasi peternakan dan kesehatan hewan
					9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak	20 Penerapan teknologi dan sistem informasi peternakan dan kesehatan hewan SDM dan kelembagaan peternakan
					10. Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja	22 Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					11. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset melalui penerapan pengawasan dan pengendalian	23 Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan
					12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui penerapan budaya kerja;	24 Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran

#### D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Kabupaten Berau, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi rencana pola ruang untuk Kawasan lindung dan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas kurang lebih 63.846,44 Ha meliputi:

- Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 17.468,33 Ha meliputi : Kecamatan Biatan; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah Kecamatan Tabalar; Kecamatan Talisayan; dan Kecamatan Teluk Bayur.
- Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 46.378,11 Ha meliputi: Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Biatan; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Talisayan; dan Kecamatan Teluk Bayur.
- Kawasan peruntukan hortikultura dengan komoditas utama berupa sayur-sayuran dan buah-buahan meliputi Kecamatan Talisayan; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Kelay; Kecamatan Biduk-biduk; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Gunung

Tabur; Kecamatan Segah; Kecamatan Teluk Bayur; Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu Putih.

- Kawasan peruntukan peternakan dengan komoditas utama berupa sapi, kerbau, kuda, kambing dan babi meliputi: Kecamatan Kelay (sapi, kambing, babi); Kecamatan Talisayan (sapi, kerbau, kuda, kambing); Kecamatan Tabalar (sapi, kerbau, kambing); Kecamatan Biduk-Biduk (sapi, kerbau, kuda, kambing); Kecamatan Pulau Derawan (sapi, kambing); Kecamatan Maratua (kambing); Kecamatan Sambaliung (sapi, kambing, babi); Kecamatan Tanjung Redeb (sapi, kerbau, kambing); Kecamatan Gunung Tabur (sapi, kerbau, kambing, babi); Kecamatan Segah (sapi, kambing, babi); Kecamatan Teluk Bayur (sapi, kambing); Kecamatan Batu Putih (sapi, kerbau, kuda, kambing); Kecamatan Biatan (sapi, kerbau, kambing).

Pola ruang wilayah Kabupaten Berau untuk kawasan budidaya

- I. Pertanian Lahan Basah 17.468,33 Ha
  - Kecamatan Biatan 1.508,58 Ha
  - Kecamatan Gunung Tabur 2.652 Ha
  - Kecamatan Sambaliung 6.504,78 Ha
  - Kecamatan Segah 2.799,35 Ha
  - Kecamatan Tabalar 2.272,68 Ha
  - Kecamatan Talisayan 492,40 Ha
  - Kecamatan Teluk Bayur 1.238,54 Ha
2. Pertanian Lahan Kering 46.378,11 Ha
  - Kecamatan Batu Putih 1.725,31 Ha
  - Kecamatan Biatan 6.691,48 Ha
  - Kecamatan Gunung Tabur 23.193,56 Ha
  - Kecamatan Sambaliung 4.574,08 Ha
  - Kecamatan Segah 2.66,47 Ha
  - Kecamatan Tabalar 1.421,75 Ha
  - Kecamatan Talisayan 5.169,97 Ha
  - Kecamatan Teluk Bayur 3.335,49 Ha

Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Berau berpedoman pada Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang serta Penetapan kawasan Strategis. Arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Berau untuk Program Perwujudan Kawasan Pertanian:

1. Kegiatan Identifikasi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
  - Kecamatan Sambaliung, Gunung Tabur, Tabalar, Biatan, Teluk Bayur, Segah dan Talisayan
2. Kegiatan Identifikasi Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  - Di tiap kecamatan yang dilalui oleh daerah irigasi
3. Kegiatan Masterplan Agropolitan
4. Kegiatan Pengembangan Pertanian Organik
5. Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian
  - Kecamatan Sambaliung, Gunung Tabur, Tabalar, Biatan, Teluk Bayur, Segah dan Talisayan
6. Kegiatan Studi Kelayakan Pengembangan Sentra Budidaya Tanaman Lahan Kering, Lahan Basah, dan Peternakan
  - Di tiap kecamatan
7. Kegiatan Pengembangan Industri Pertanian Berbasis Agro
  - Kecamatan Sambaliung, Gunung Tabur, Tabalar, Biatan, Teluk Bayur, Segah dan Talisayan

## E. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Berau adalah sebagai berikut:

No.	ISU STRATEGIS
<b>ISU STRATEGIS LEVEL GLOBAL/ NASIONAL</b>	
1	<i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> Sebagai Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan Milenium ( <i>Millenium Development Goals</i> )
2	Tantangan Terhadap Perkembangan Revolusi Industri 4.0
3.	Perpindahan ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur
4.	Terbatasnya anggaran pemerintah pusat akibat COVID -19
<b>ISU STRATEGIS LEVEL DAERAH/REGIONAL</b>	
1	Pengembangan Agro-Industri Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2	Dampak pembangunan pasca penanganan pandemic COVID-19
3	Pertumbuhan penduduk
4	Alih Fungsi Lahan
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian
6	Terbatasnya SDM Pertanian baik petani maupun petugas yang kualitas dan kuantitasnya masih relatif rendah
7	Lemahnya akses petani terhadap akses permodalan
8	Lemahnya akses petani terhadap akses permodalan
9	Hilirisasi produk pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura
10	Optimalisasi koordinasi instansi terkait

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan tujuan ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dijabarkan dalam table 4.1 berikut.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal Renstra	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian</b>									
	Meningkatnya Produksi Pertanian	1 Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	ton/ha	2,96	3,07	3,15	3,26	3,37	3,49	3,62
		2 Produktivitas Jagung	ton/ha	5,44	5,55	5,65	5,75	5,85	5,95	6,00
		3 Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit)	ton/ha	3,52	3,62	3,77	3,90	4,02	4,17	4,25
2	<b>Meningkatkan Kontribusi Sektor Peternakan</b>									
	Meningkatnya Produksi Peternakan	1 Produksi Daging Sapi	ton	470,18	472,35	474,71	477,09	479,47	481,87	484,28
		2 Produksi Telur Ayam Ras	ton	1.753	1.805,59	1.859,76	1.915,55	1.973,02	2.032,21	2.093,17

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### **A. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau**

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pertanian dan Peternakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Peternakan yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel 5. I. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI (RPJMD)</b>	:	<b>Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan</b>		
<b>MISI (RPJMD)</b>	:	<b>Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian		Meningkatnya Produksi Pertanian	I. Peningkatan intensifikasi pertanian	1. Fasilitasi penyediaan, penggunaan benih/ bibit unggul, pupuk dan pestisida 2. Penerapan teknologi budidaya, teknologi pasca panen dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 3. Pengembangan penangkaran benih/ bibit unggul bersertifikat 4. Pelaksanaan Sekolah Lapanga Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)

<b>VISI (RPJMD)</b>	:	<b>Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan</b>		
<b>MISI (RPJMD)</b>	:	<b>Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			2. Peningkatan kapasitas SDM petani	1. Sosialisasi/pelatihan teknologi pertanian
			3. Peningkatan Mekanisasi Pertanian	1. Fasilitasi pengadaan dan pemeliharaan dan alat mesin pertanian
			4. Peningkatan prasarana pertanian	1. Fasilitasi peningkatan jaringan irigasi tersier dan jalan usaha tani
			5. Peningkatan kapasitas SDM pertanian	1. Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan penyuluh 2. Fasilitasi pengembangan demplot dan sekolah lapang bagi petani
Meningkatkan Kontribusi Sektor Peternakan		Meningkatnya Produksi Peternakan	1. Peningkatan mutu genetic bibit ternak	1. Fasilitasi sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB)
				2. Fasilitasi untuk kapasitas dan jumlah SDM petugas

<b>VISI (RPJMD)</b>	:	<b>Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan</b>		
<b>MISI (RPJMD)</b>	:	<b>Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			2. Peningkatan peran swasta untuk program Penggemukan Ternak (Fattening)	1. Fasilitasi kemudahan akses perijinan dan pembiayaan
				2. Fasilitasi ketersediaan ternak bakalan
				3. Fasilitasi peningkatan jumlah dan kualitas pakan ternak
			3. Peningkatan peran swasta dalam usaha pengembangan ayam petelur	1. Fasilitasi kemudahan akses perijinan dan pembiayaan
				2. Fasilitasi pembinaan kemitraan perunggasan
				3. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM peternak
			4. Peningkatan pelayanan keswan	1. Peningkatan kapasitas SDM dan kader Kesehatan hewan

<b>VISI (RPJMD)</b>	:	<b>Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan</b>		
<b>MISI (RPJMD)</b>	:	<b>Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
				2. Peningkatan sarana prasarana di UPT. Puskesmas
			5. Pencegahan penyakit hewan menular strategis	1. Vaksinasi jembrana dan SE untuk ternak ruminansia
				2. Fasilitasi pemeriksaan titer antibody penyakit unggas

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### **A. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau**

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau merupakan prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. Program dan indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program tersebut.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau dijabarkan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6. 1. Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026



Kode rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026							
					2021		2022		2023		2024		2025									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																					
01.00	Dinas Pertanian dan Peternakan																					
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan/Dokumen yang dijilid	eksemplar		30	Rp	14.824.200	20	Rp	25.000.000	20	Rp	25.000.000	30	Rp	25.000.000	30	Rp	25.000.000			
		Jumlah fotocopy	lembar		2.500			2.500			2.500			2.500	Rp	1.250.000	2.500	Rp	1.500.000	2.500	Rp	1.500.000
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	koran		24	Rp	7.000.000	24	Rp	7.000.000	24	Rp	7.000.000	24	Rp	7.000.000	24	Rp	7.000.000	24	Rp	7.000.000
3.27.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan ke dalam Kabupaten	kali		50	Rp	300.000.000	30	Rp	200.000.000	30	Rp	200.000.000	30	Rp	200.000.000	30	Rp	200.000.000	30	Rp
	Jumlah perjalanan ke Luar Kabupaten Berau		kali		29			25			25			29	Rp	100.000.000	29	Rp	100.000.000	30	Rp	100.000.000
	Musrenbang dan Konsolidasi Program dan Kegiatan Kementan, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan				10																	
INDIKATOR PINDAH REKENING																						
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		12	Rp	831.379.424	12	Rp	911.500.000	12	Rp	912.500.000	12	Rp	992.500.000	12	Rp	992.500.000	12	Rp	1.001.500.000
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja perangko/materai	lembar		200	Rp	1.477.000	100	Rp	1.500.000	100	Rp	1.500.000	100	Rp	1.500.000	100	Rp	1.500.000	100	Rp	1.500.000
3.27.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan telepon, sumber daya air dan listrik	bulan		12	Rp	200.000.000	12	Rp	200.000.000	12	Rp	200.000.000	12	Rp	200.000.000	12	Rp	200.000.000	12	Rp
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran	OB		16	Rp	629.902.424	18	Rp	710.000.000	18	Rp	711.000.000	20	Rp	791.000.000	20	Rp	791.000.000	20	Rp
		Penyediaan perlengkapan kebersihan kantor	jenis		60			20			20											
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen		100	Rp	233.320.000	100	Rp	245.000.000	100	Rp	250.000.000	100	Rp	255.000.000	100	Rp	275.000.000	100	Rp	275.000.000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan	unit		87	Rp	198.320.000	60	Rp	200.000.000	60	Rp	200.000.000	60	Rp	200.000.000	60	Rp	200.000.000	60	Rp	200.000.000
3.27.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan (sarana kerja) yang diperbaiki	unit		15	Rp	10.000.000	15	Rp	10.000.000	15	Rp	10.000.000	15	Rp	15.000.000	15	Rp	15.000.000	15	Rp
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	kantor		1	Rp	25.000.000	2	Rp	35.000.000	2	Rp	40.000.000	2	Rp	40.000.000	3	Rp	60.000.000	3	Rp
3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	Ton/Ha	2,96	3,07	Rp	2.789.898.494	3,15	Rp	22.124.500.000	3,26	Rp	9.945.000.000	3,37	Rp	10.920.000.000	3,49	Rp	12.120.000.000	3,62	Rp
		Produktivitas Jagung	Ton/Ha	5,44	5,55			5,65			5,75			5,85			5,95			6,00		
		Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)	Ton/Ha	3,52	3,62			3,77			3,90			4,02			4,17			4,25		

Kode rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
01.00	Dinas Pertanian dan Peternakan																
		Produksi Daging Sapi	Ton	470,178	472,35		474,71		477,09		479,47		481,87		484,28		
		Produksi Telur Ayam Ras	Ton	1.753	1805,59		1859,76		1915,55		1973,02		2032,21		2093,17		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengadaan dan Pengawasan Penggunaan Alsintan	unit		6	Rp 429.999.700	10	Rp 9.855.000.000		10	Rp 1.250.000.000	10	Rp 1.350.000.000	11	Rp 1.450.000.000	11	Rp 1.604.000.000
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan Alsintan	unit		6	Rp 429.999.700	10	Rp 9.855.000.000		10	Rp 1.250.000.000	10	Rp 1.350.000.000	11	Rp 1.450.000.000	11	Rp 1.604.000.000
		Rincian RKA :															
		Tenaga Teknis Alsintan	orang		0		1		0		0		0		0		0
		Mobilisasi Alsin	tahun		1		0		1		1		1		1		1
		Pembinaan Kelompok UPJA	kelompok		3		3		3		3		3		3		3
		Alat Tanam Jagung	unit		0		50		100		100		100		100		100
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDG Tumbuhan	Ha		378	2.049.901.100	6.035	11.389.500.000	7.550	7.800.000.000	7.917	8.500.000.000	8.322	9.400.000.000	8.677	10.358.000.000	
		Terkelolanya SDG Hewan	Ekor		800		850		900		950		1000		1100		
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya IB pada Ternak Sapi	ekor		800	Rp 969.999.100	850	Rp 4.060.000.000		900	Rp 1.100.000.000	950	Rp 1.300.000.000	1.000	Rp 1.500.000.000	1.100	Rp 1.854.000.000
		Terlaksananya IB pada Ternak Kambing	ekor		0		50		75		80		90		100		
		Rincian RKA :															
		Tersedianya paket sarana dan prasarana IB	paket		1		1		1		1		1		1		1
		Sosialisasi dan Pembinaan	tahun		1		1		1		1		1		1		1
		Peningkatan jumlah dan kapasitas petugas IB, PKB dan ATR	orang		2		2		2		2		2		2		2
		Pengadaan Sapi	ekor		0		60										
		Pengadaan Kambing	ekor		70		140										
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya Benih Padi Unggul (UPT. BBPH)	ton		20	Rp 649.991.200	5	Rp 900.000.000		6	Rp 1.000.000.000	7	Rp 1.200.000.000	8	Rp 1.400.000.000	9	Rp 1.600.000.000
		Tersedianya Benih Padi Unggul (Penangkar)	ton				20		25		27		29		32		



Kode rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
01.00	Dinas Pertanian dan Peternakan																
		Pengadaan Chopper Sawit dan Chopper Rumput	Unit		0		2		2		0		0		0		
		Fasilitasi Sertifikasi dan Pelabelan Pupuk Organik	kelompok		0		0		2		2		2		2		2
		Pengadaan UPPU	unit		1		1		0		0		0		0		0
		Pembinaan dan Penerapan Teknologi Pakan Ternak	kelompok		15		15		15		15		15		15		15
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	Ha	230	265	Rp 799.973.232	300	Rp 7.645.000.000	400	Rp 2.145.000.000	450	Rp 2.393.000.000	550	Rp 2.675.000.000	550	Rp 2.942.500.000	
3.27.03.02.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Data LP2B/KP2B/LCP2B	dokumen		1	Rp 799.973.232	1	Rp 7.645.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 153.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	
		Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	unit		5		4										
3.27.03.02.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Inventarisasi data LP2B/KP2B/LCP2B	dokumen		1	Rp 799.973.232	1	Rp 7.645.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 153.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	
		RJIT	Ha	230	265		300		INDIKATOR PINDAH REKENING KEGIATAN 3.27.03.02.02								
		DAM Parit	Unit	0	1		2										
		Pintu Air	Unit	0	1		2										
		Optimasi Lahan	Ha	0	0		75										
3.27.03.02.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit						11	Rp 1.995.000.000	12	Rp 2.240.000.000	13	Rp 2.475.000.000	13	Rp 2.742.500.000	
3.27.03.02.02.01	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	RJIT	Ha						400	Rp 600.000.000	450	Rp 650.000.000	550	Rp 750.000.000	550	Rp 962.500.000	
3.27.03.02.02.04	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	DAM Parit	Unit						3	Rp 300.000.000	3	Rp 400.000.000	3	Rp 450.000.000	3	Rp 485.000.000	
3.27.03.02.02.06	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Pintu Air	Unit						3	Rp 475.000.000	3	Rp 550.000.000	3	Rp 615.000.000	3	Rp 615.000.000	
3.27.03.02.02.09	Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Optimasi Lahan	Ha						75	Rp 620.000.000	75	Rp 640.000.000	75	Rp 660.000.000	75	Rp 680.000.000	
									SEBELUMNYA MASUK SUB KEG. 3.27.03.02.01.01								
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	8,5	8,50	Rp 1.443.104.326	9,00	Rp 2.050.000.000	9,50	Rp 2.410.000.000	10,00	Rp 2.620.000.000	10,50	Rp 2.780.000.000	11,00	Rp 3.058.000.000	
		Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas	%	0	0,50		1,00		1,20		1,30		1,40		1,50		



Kode rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
01.00	Dinas Pertanian dan Peternakan																
		Pengadaan Obat Hewan dan Peralatan Veteriner/Kedokteran Hewan	paket		0		2		2		2		2		2		2
		Pengawasan Peredaran Obat Hewan dengan Pengujian Sampel Obat Hewan	sampel		0		4		5		5		5		5		5
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner pada pelaku usaha	sampel		180	Rp 199.993.586	200	Rp 800.000.000	250	Rp 950.000.000	275	Rp 1.050.000.000	300	Rp 1.150.000.000	325	Rp 1.225.000.000	
		Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di UPT. RPH	ekor	916.936	1.202.300		1.202.100		1.302.200		1.402.300		1.452.400		1.502.500		
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pemotongan Ternak Ruminansia	ekor	SEBELUMNYA KEG 3.27.04.2.05		Rp 99.993.786	2.100	Rp 600.000.000	2.200	Rp 650.000.000	2.300	700.000.000	2.400	750.000.000	2.500	800.000.000	
		Jumlah Pemotongan Unggas	ekor	914.962	1.200.000		1.200.000		1.300.000		1.400.000		1.450.000		1.500.000		
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jaminan Produk Hewan dan Produk Asal Hewan Aman	sampel	150	180	Rp 99.999.800	200	Rp 200.000.000	250	Rp 300.000.000	275	Rp 350.000.000	300	Rp 400.000.000	325	Rp 425.000.000	
		Rincian RKA :															
		Pengawasan Pemotongan Hewan Kurban	ekor	1000	1.050		1.100		1.150		1.175		1.200		1.225		
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis di UPT. RPH	ekor	1974	2.300	Rp 217.996.406	PINDAH SUB KEGIATAN 3.27.04.2.04.01										
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pemotongan Ternak Ruminansia	ekor	1974	2.300	Rp 217.996.406											
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Ha	312	500	Rp 199.999.800	2.535	Rp 2.788.900.000	3.305	Rp 1.998.200.000	4.000	Rp 2.477.500.000	4.700	Rp 2.942.000.000	5.000	Rp 3.236.200.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kecamatan		10	Rp 199.999.800	10	Rp 2.788.900.000	10	Rp 1.998.200.000	10	Rp 2.477.500.000	10	Rp 2.942.000.000	10	Rp 3.236.200.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pelayanan Aktif Pengendalian/ Penanggulangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kali	24	24	Rp 199.999.800	36	Rp 2.788.900.000	48	Rp 1.998.200.000	48	Rp 2.477.500.000	48	Rp 2.942.000.000	48	Rp 3.236.200.000	



Kode rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026	
					2021		2022		2023		2024		2025			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
01.00	Dinas Pertanian dan Peternakan															
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pembinaan Kelembagaan Petani	Kelompok	28	60	Rp 199.993.488	66	Rp 360.000.000	66	Rp 370.000.000	65	400.000.000	65	420.000.000	65	Rp 325.000.000
		Rincian RKA :														
		Pembinaan Kelompok Tani	Kelompok	28	55		60		60		60		60		60	
		Pembinaan Gapoktan	Gapoktan		4		2		2		2		2		2	
		Pembinaan P3A	Kelompok		0		2		2		1		1		1	
		Pembinaan UPJA	Kelompok		0		1		1		1		1		1	
		Pembinaan P4S	Kelompok		1		1		1		1		1		1	
		PENAS XVI	Kali		0		1		0		0		0		0	
		Pra PEDDA	Kali		0		0		1		0		0		0	
		PEDA	Kali		0		0		1		0		0		0	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persen	26%	5%	Rp 396.881.600	10%	Rp 1.270.000.000	22%	950.000.000	30%	1.650.000.000	3%	300.000.000	4%	Rp 675.000.000
		Rincian RKA :														
		Kendaraan Roda 2					10		10		3					
		Kendaraan Roda 4									1					
		Printer			7				1							
		Alat Pengukur PH Tanah					8				35					
		Alat Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS)							10							
		Alat Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK)							10							
		Alat Ubin							10							
		Infocus									4					
		Wirlees	Unit								4					
		Drone	Unit									4			4	
		GPS	buah								10					
		Takiron	buah								1					
		Cultivator	unit		2								1		4	
		Pembuatan Demplot	Unit	4	4		5		5		5		5		5	
		Penyusunan Program	Kali		0		11		11		11		11		11	
		Jumlah Petani yang Berhasil dalam Produksi Pemasaran	orang	240	175		0		0		0		0		0	
						Rp 22.601.535.964		Rp 56.208.900.000		Rp 39.060.900.000		Rp 41.674.214.000		Rp 43.528.793.280		Rp 46.819.982.944

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### A. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Berau Tahun 2021-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun indikator kinerja PD yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7. I. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	3	3,07	3,15	3,26	3,37	3,49	3,62
2	Produktivitas Jagung	5	5,55	5,65	5,75	5,85	5,95	6
3	Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit)	4	3,62	3,77	3,9	4,02	4,17	4,25
4	Produksi Daging Sapi	470	472,35	474,71	477,09	479,47	481,87	484,28
5	Produksi Telur Ayam Ras	1.753	1.805,59	1.859,76	1.915,55	1.973,02	2.032,21	2.093,17
6	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	230	265	300	400	450	550	550
7	Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9	8,5	9	9,5	10	10,5	11
8	Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas	-	0,5	1	1,2	1,3	1,4	1,5
9	Tingkat Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	312	500	2.535	3.305	4.000	4.700	5.000

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian dan Peternakan yang Difasilitasi	0	33	33	40	42	44	45
11	Cakupan Bina Kelompok Petani	83	84	85	86	87	88	89

## BAB VIII

### PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Berau merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau adalah penjabaran program RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan disusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA); dan
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2021-2026 dengan baik dan benar;

2. Program kegiatan sub kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-PD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra diperlukan:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program kegiatan dan sub-kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan.